

Memory Owner: Jatirejo Village Boundary Gate Lumajang District

Mawardi Purbo Sanjoyo^{a*}, Ifan Maulana Ishak^b, Dimas Permadi Awwalun^a

^aUniversitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

^bUniversitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*mawardiqsanjoyo@gmail.com

Abstract

This paper is focused on discussing the gate that acts as a monument in building and transforming the collective identity of the community. So that looking at the meaning function of the gate, this paper aims to link the study of the meaning of the gate and the form of memorialization of the history attached to the gate. Like the Jatirejo Village boundary gate, for example, the gate is not only a boundary of power, but also carries a memory that will continue to be carried. The analysis obtained that the Jatirejo village gate displays three important elements, namely, first, the symbol of Pancasila and the logo of the Regional Government regarding the cultivation of nationalist patriotism and territorial affirmation as a regional existence. Second, the writing of a Javanese slogan about the values of wisdom in life, so the meaning of Jer Basuki Mawa Beya and the writing Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe, a Javanese proverb that indirectly teaches Javanese people to work hard without excessive expectations. Third, there are pictures of cassava, rice, and corn, which illustrate the local commodities of farmers in Jatirejo Village, where the majority of people work as farmers. Thus, the existence of the gate has walked a long round, from the present to the past and back again, while illustrating the interdependence of various events and historical roles played by the people of Jatirejo Village.

Keywords: Arches, Village Boundaries, Collective Memory

Pemilik Memori: Gapura Pembatas Desa Jatirejo Kabupaten Lumajang

Abstrak

Paper ini difokuskan untuk membahas tentang gapura yang berperan sebagai monumen dalam membangun dan mentransformasikan identitas kolektif masyarakat. Sehingga melihat pada fungsi pemaknaan yang dimiliki gapura, tulisan ini bertujuan mengaitkan studi tentang pemaknaan gapura dan bentuk memorialisasi atas sejarah yang dilekatkan pada gapura.. Seperti gapura pembatas Desa Jatirejo misalnya, gapura tidak hanya sebagai suatu batas kekuasaan semata, tetapi juga membawa memori yang akan terus dibawa. Analisis yang diperoleh bahwasanya gapura desa Jatirejo menampilkan tiga elemen penting, yakni Pertama, lambang pancasila dan logo Pemda tentang penanaman jiwa patriotisme nasionalis dan penegasan teritori sebagai eksistensi kewilayahan. Kedua, tulisan sebuah slogan Ajaran Jawa mengenai nilai-nilai kearifan dalam kehidupan, begitu arti dari Jer Basuki Mawa Beya dan tulisan Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe, pepatah Jawa yang secara tidak langsung mengajarkan orang Jawa agar bekerja dengan giat tanpa pamrih yang berlebihan. Ketiga, tentang adanya gambar singkong, padi dan jagung yakni menggambarkan komoditas lokal petani di Desa Jatirejo yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Demikian eksistensi gapura telah menyusuri suatu putaran panjang, dari masa kini ke masa lalu dan kembali lagi, seraya menggambarkan interpedensi berbagai macam peristiwa dan peran-peran historis yang diperankan oleh masyarakat Desa Jatirejo.

Kata Kunci : Gapura, Batas Desa, Memori Kolektif

Pendahuluan

Permukiman desa merupakan bentuk awal dari kehidupan kolektif yang terdiri dari sejumlah individu yang umumnya saling mengenal satu sama lain, dengan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor agraris seperti pertanian dan perikanan—jenis pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan hukum alamiah. Di dalam lingkungan desa tersebut, umumnya terjalin hubungan kekeluargaan yang erat serta kepatuhan tinggi terhadap nilai-nilai tradisi dan norma sosial. Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh Herman Warner Muntinghe pada tanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintah kolonial, disebutkan bahwa desa-desa semacam ini telah ditemukan di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Belakangan, struktur sosial desa serupa juga dijumpai di wilayah kepulauan luar Jawa, menunjukkan adanya pola kehidupan desa yang relatif mirip di berbagai daerah. (Kartohadikoesoemo, 1984).

Dengan adanya sebuah kompleks hunian beberapa komunal, tentunya ada sebuah batasan teritorial untuk menandainya. Sistem penandaan tersebut umumnya berbentuk gapura, tugu dan bagunan sejenisnya, dengan alasan dibalik pembangunan gapura di wilayah pedesaan sejatinya tidak hanya didasarkan sebagai sebuah tanda batas antar wilayah disekitarnya, tetapi juga terkait dengan peran gapura dalam membawa suatu memori masyarakat itu sendiri dan bahkan terkait sejarah desa.

Di pedesaan, gapura seringkali merupakan bangunan permanen. Pada umumnya gapura dibangun diantara jalan poros desa dengan dua sisi yang sama, dengan bermacam-macam variasi dan pola sebagai kesan menambah nilai estetika bagi desa itu sendiri. Akan tetapi, berbeda jika pada perbatasan setingkat kota atau kabupaten, gapura terkadang dibangun dengan menggunakan berbagai gaya yang rumit, dengan motif-motif yang menandai suatu identitas tertentu pada sebuah kota. Namun, pada umumnya tulisan-tulisan yang menyertai bagunan gapura ialah tulisan penanda masuk wilayah tersebut atau ucapan selamat datang hingga diksi yang disertakan dengan maksud untuk melekatkan identitas wilayah itu sendiri.

Gapura dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu artefak penting yang mencerminkan batas wilayah sekaligus identitas suatu tempat, baik dalam lingkup pedesaan maupun perkotaan. Keberadaannya memiliki nilai strategis sebagai penanda kawasan yang tak hanya memberi informasi, tetapi juga membentuk kesan awal terhadap daya tarik wilayah tersebut. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pembangunan gapura merupakan bagian dari pengembangan daya tarik wisata guna meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata(Sari et al., 2019). Dalam praktiknya, terdapat banyak contoh gapura sebagai penanda wilayah, seperti kasus viral gapura bertuliskan “Selamat Datang Di Sumedang Kota Tahu” yang menuai kritik publik karena dianggap memiliki desain yang kurang menarik.

Artikel ini berusaha mengetengahkan proses saling pengaruh antara monumen, memori desa dan perjuangan simbolik dalam pencarian identitas dan kekuasaan. Mengutip pada argumen Benedict Anderson tentang bagaimana monumen sebagai sebuah tipe penting dari “wicara simbolik” bagi budaya politik Indonesia, ia juga menyatakan bahwa hanya segelintir pengamat yang telah mengakui monumen sebagai tipe wicara atau mencoba menilik secara konkret apa yang diungkapkan dari bentuk dan isinya, dan mengapa sampai mengambil wujud dengan demikian (Kusno, 2007). Maka untuk memahami sebuah budaya tertentu, analisis terhadap isi monumen menjadi sangat penting meski sekilas tidak bisa untuk menjelaskan secara keseluruhan mengenai peran monumen dalam membangun dan mentransformasikan

identitas kolektif masyarakat. Sehingga melihat pada fungsi pemaknaan yang dimiliki gapura, tulisan ini bertujuan mengaitkan studi tentang pemaknaan gapura dan bentuk memorialisasi atas sejarah yang dilekatkan pada gapura.

Kendati demikian, penting untuk dipahami bahwa gapura sebagai bentuk dari “wicara simbolik” tidak dimaksudkan untuk menjadi monumen atau lokus peringatan. Gapura sebagai objek yang kerap kali diabaikan oleh para peneliti ilmu-ilmu sosial, khususnya sejarawan. Tidak sama seperti halnya artefak-artefak yang lain yang kerap kali dianggap sebagai bagian daripada kehidupan “normal” sehari-hari, sehingga peran gapura sebagai salah satu bagunan memori masyarakat sudah biasa dilupakan. Namun, justru gapura sebagai monumen yang sering kali dijumpai secara tidak sadar ia memainkan peran penting dalam mengekspresikan identitas teritorial dan memuat ingatan-ingatan masyarakat, hingga politik pelupaan yang sengaja dibangun.

Dengan bertolak pada gapura, tulisan ini akan menelisik lebih jauh bagaimana fungsi dan perubahan makna pada gapura, Selain itu juga bagaimana gapura masih terus menjadi medium visual yang melaluiinya ingatan-ingatan kolektif masyarakat dibentuk dan di transformasikan melintasi tatanan-tananan historis yang berbeda. Daripada memandang gapura hanya sebatas penanda batas teritorial dan sekedar gejala dari evolusi masyarakat belaka.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer seperti arsip, dokumen peraturan pemerintah, serta foto dan artefak gapura, dan juga sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait. Setelah itu, dilakukan kritik sumber secara eksternal untuk menguji keaslian dokumen dan internal untuk memahami isi serta konteksnya. Selanjutnya, tahap interpretasi digunakan untuk menafsirkan fungsi dan perubahan makna gapura dari waktu ke waktu sebagai simbol batas, identitas desa, dan wadah memori kolektif masyarakat, dengan pendekatan teori wicara simbolik dan memorialisasi, bahwa memori bukan persoalan mengingat saja tetapi juga sebuah proses pelupaan, dan bangunan gapura sebagai objek monumen politik memori (Ater, 2010). Tahap akhir adalah historiografi, yakni penulisan hasil interpretasi secara sistematis untuk merekonstruksi peran penting gapura dalam dinamika sejarah sosial budaya masyarakat desa, serta relasinya dengan kekuasaan dan politik identitas dari masa kolonial hingga masa kini (Kuntowijoyo, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Desa dengan Persepsi yang Beragam

Penulis harus mengakui bahwa lokasi penelitian dimana penulis menemukan semacam persoalan yang cukup menarik, persoalan tentang adanya pembentukan desa-desa baru terbentuk akibat dari campur tangan pemerintah kolonial. Pasalnya, perubahan desa atas campur tangan kolonial tentu atas kepentingan politik perekonomian yang dibangun pada skala desa. Djoko Suryo misalnya mengemukakan bahwa awal modernisasi dan pembangunan di pedesaan Jawa secara historis dapat ditarik jauh kebelakang pada abad ke-19 terutama pada sistem tanam paksa (*cultur stelsel*) dan kapitalisme perkebunan. Hal ini menarik

bahwa dari fenomena tersebut akan terjadi realitas yang akan membawa perubahan-perubahan dan respon-respon yang secara politik terjadi di pedesaan Jawa secara sporadis (Sosialismanto, 2001).

Ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang keberadaan desa pertama kali muncul dalam Regeringsreglement (RR) tahun 1854, tepatnya pada Pasal 71 yang membahas mengenai peran Kepala Desa serta struktur pemerintahan desa. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, pemerintah kolonial Belanda kemudian mengesahkan Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO) pada tahun 1906, yang berfungsi sebagai regulasi dasar terkait desa-desa di wilayah Jawa dan Madura. Namun, IGO bukanlah peraturan yang menciptakan desa baru, melainkan hanya memberikan dasar hukum formal sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi desa-desa yang telah ada sebelumnya (Tahir, 2018).

Sebagai akibat kontral ketat dari pemerintahan kolonial prinsip "otonomi" desa yang telah lama dipertahankan sungguh merosot. Secara tradisional, desa-desa Jawa mempunyai status otonom, yang menetapkan desa sebagai badan hukum dengan hak untuk menangani persoalan-persoalannya sendiri dan memilih kepala desanya sendiri. Kepala desa adalah pemimpin masyarakat dan bukan pegawai pemerintah. Ia dipilih oleh anggota desa yang mempunyai hak, dan tidak menerima upah apapun juga dari pemerintah kecuali 8% komisi atas pengumpulan pajak tanah. Sebaliknya, ia diberi sebidang tanah oleh desa sebagai honorium dan berkewajiban untuk hidup dari tanah ini.

Otonom desa diperjelas dengan oleh kontrol pemerintah kolonial dengan dirumuskannya Inlandse Gemeente Ordonantie IGO tadi dengan ayat pertama yang menyebutkan ordonansi bahwa pengelolahan desa harus dijalankan oleh kepala desa dengan dibantu oleh beberapa orang yang diangkat olehnya (Kurasawa, 1993). Tentu saja pemerintah kolonial Belanda sesungguhnya dalam banyak hal secara terus-menerus campur tangan atas kehidupan desa, dan pada kenyataannya kepala desa dikenakan tugas-tugas negara seperti pengumpulan pajak dan pemeliharaan keamanan. Ia juga diharuskan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan secara teratur yang diselenggarkan di kantor kecamatan. Selain itu, ia juga dapat dipecat oleh pemerintah kalau dianggap bertanggung jawab atas kesalahan tingkah laku, ketidakpatuhan, atau lalai dalam menjalankan kewajiban, tetapi sesungguhnya hal ini jarang terjadi. Sekalipun ada campur tangan semacam itu, pemerintah Belanda selalu berusaha mempertahankan kesan bahwa mereka berusaha untuk menghormati otonomi desa sebanyak mungkin (Kurasawa, 1993).

Namun, di bawah kekuasaan Jepang, kontak langsung antara "negara" dan "desa" meningkat lebih jauh, dan peran kepala desa vis-a-vis pemerintah sangat diperbesar. Mereka harus menjalankan kewajiban lebih demi keuntungan negara daripada demi masyarakat yang mereka wakili, dan diharapkan semakin lama semakin menjadi abdi negara daripada sebelumnya pada zaman Belanda. Sehingga dari sini muncul nantinya desa-desa baru seperti kasus yang ada di desa Jatirejo, dimana sejarah desa terbentuk dari pemekaran desa Jatigono yang telah lama terbentuk sekitar tahun 1870-an.

Hal ini mengacu dalam beberapa kasus misalnya, yang sejarah desanya baru dimulai sekitar tahun 1910-an, dan beberapa tanah partikelir (particuliere landerijen), kebanyakan diantaranya terorganisasi sebagai unit-unit administratif baru setelah Jepang tiba. Sehingga sangat wajar jika di Karesidenan Besuki (meliputi kabupaten-kabupaten Jember, Situbondo, Banyuwangi, dan Bondowoso) terdapat lima pergantian kepala desa selama periode waktu yang sama, yaitu tiga setengah tahun, sementara di daerah-daerah dari bekas particuliere landerijen pergantian hanya berlangsung satu dari delapan desa (Kurasawa, 1993).

Terlepas daripada itu, sejarah Desa Jatirejo telah lama dibentuk dan dikontruksi oleh Pemerintah Desa Jatirejo bersama dengan tokoh agamawan dan masyarakat setempat guna menyelidiki sejarah atau asal mula desa terbentuk. Dan menyebutkan bahwa Desa Jatirejo terbentuk akibat perpecahan wilayah antara Desa Jatigono yang disinyalir terbentuk lebih dahulu. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa Sejarah Desa Jatirejo tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Samin yang ada di Kabupaten Lumajang. Desa ini awalnya bernama Jatigono. Karena seiring pertambahan jumlah penduduk yang semakin padat dan pesat maka Desa Jatigono di bagi menjadi tiga Desa dengan nama yang memiliki kesamaan yaitu Desa Jatigono, Desa Jatirejo, dan Desa Jatimulyo. Karena dahulu kawasan tersebut banyak ditumbuhi oleh pohon jati, dapat pula disebut sebagai hutan jati.

Ada pula kontruksi tulisan sejarah yang telah diringkas oleh Pemerintah Desa Jatirejo, yang berpendapat bahwa Tahun 1870 tepatnya pada masa jajahan Belanda dan penduduk Desa Jatigono masih sangat sedikit. Desa ini ditumbuhi oleh banyak pohon jati yang sangat lebat dan besar, seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin ramai. Suatu ketika penduduk desa menebang kayu jati tersebut terdapat golekan atau semacam boneka. Gono masyarakat menyebutnya, dengan semakin ramainya penduduk yaitu tahun 1871 akhirnya dinamakanlah Desa Jatigono.

Pemberian nama desa ini didasarkan pada penemuan golek atau gono di dalam kayu jati yang dibelah tersebut yang pada saat itu dipimpin oleh Pak Sapirin dan ikut Wedono atau Distrik Tempeh, pada bulan Juni 1969 pada masa kepemimpinan H. Moch. Rais. Karena banyaknya kepentingan individual maka Desa Jatigono dipecah menjadi 3 desa yaitu: Desa Jatigono yang letaknya sebelah utara, Desa Jatirejo yang letaknya di bagian tengah, dan Desa Jatimulyo yang letaknya di bagian selatan (Jatirejo, 2019).

Kedudukan sejarah masyarakat pedesaan dewasa ini oleh beberapa ahli sudah ditempatkan dalam perkembangan sejarah baru (modern) secara proporsional. Hal ini menandai era baru, untuk tidak lagi berkiblat pada penulisan sejarah kolonial dengan metode konvensional yang selalu mengutamakan penulisan sejarah politik elite kelembagaan seperti raja dan kerajaan, perang, perebutan kekuasaan dan lain-lain. Dengan demikian keberagaman persepsi kesejarahan masyarakat desa harus mendapat apresiasi, karena bagaimanapun penulisan sejarah modern yang dikenal dengan "sejarah sosial" lebih mengutamakan pada penulisan sejarah kerakyatan yang berusaha merekam kehidupan sehari-hari masyarakat petani di desa dalam mencari nafkah. Dan disini juga harus diingat bahwa petani dimanapun termasuk di pedesaan Jawa tidak banyak meninggalkan catatan-catatan politiknya (petani adalah les peuples sans historie), sekalipun banyak peristiwa sosial yang dialami (Sosialismanto, 2001).

Gapura dan Batas Kekuatan Tradisional

Pemahaman umum mengenai gapura dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Dalam bahasa Sanskerta, istilah "gapura" merujuk pada gerbang atau pintu masuk. Pada masa Hindu-Buddha, gapura merupakan bagian integral dari kompleks percandian, berfungsi sebagai jalur masuk dan keluar. Perbedaan utama antara candi dan gapura terletak pada struktur ruangnya; candi memiliki ruang tertutup, sementara gapura berbentuk lorong terbuka yang digunakan untuk lalu lintas masuk dan keluar (Purnengsih & Kholisya, 2019). Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gapura diartikan sebagai pintu besar yang menjadi akses masuk ke pekarangan rumah, taman, atau tempat lainnya.

Gapura sebagai elemen arsitektur tradisional di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penanda batas wilayah, tetapi juga memiliki nilai simbolik, budaya, dan historis yang kuat. Gapura pembatas desa merupakan salah satu bentuk adaptasi dari budaya lokal yang berkembang dari masa ke masa, dari fungsi sakral hingga kini menjadi representasi identitas dan kebanggaan komunitas lokal.

Secara historis, bentuk awal gapura banyak ditemukan dalam konteks arsitektur Hindu-Buddha, seperti pada masa Kerajaan Majapahit dan Singhasari. Gapura saat itu dibuat dengan struktur candi bentar (tanpa atap) atau paduraksa (dengan atap), yang menandai wilayah sakral seperti pura atau candi (Yanda Bara Kusuma et al., 2024). Seiring dengan Islamisasi Nusantara, bentuk dan fungsi gapura mulai mengalami akulturasi, terlihat dari ornamen dan kaligrafi yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks pedesaan modern, gapura pembatas desa berfungsi sebagai simbol penyambutan dan penanda administratif wilayah. Selain itu, menurut Kramer, bangunan ikonik juga merupakan pembentukan citra negara modern dan merupakan bagian dari pergulatan wacana pembentuk citra (Brigham, 1999). Gapura juga menjadi medium ekspresi budaya lokal yang menampilkan ikon-ikon khas desa seperti motif batik, alat pertanian, atau figur tokoh lokal. Gapura sering dibangun dengan dana swadaya masyarakat atau program pembangunan desa, menjadikannya bagian dari partisipasi sosial dan pembangunan kolektif (Angga et al., 2023). Gapura juga dapat merepresentasikan identitas lokal yang ingin ditonjolkan oleh desa tersebut. Penamaan desa, motto, hingga tanggal berdiri sering kali diabadikan dalam gapura, menjadikannya arsip visual sejarah lokal. Dalam beberapa kasus, gapura juga berfungsi sebagai batas simbolik yang menunjukkan perbedaan nilai, adat, bahkan sistem sosial antar desa atau kecamatan.

Gapura kerap ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, di mana ia berfungsi sebagai pintu gerbang menuju bangunan atau kompleks penting seperti keraton, makam keramat, pura, maupun puri. Secara historis, gapura juga dikenal sebagai akses keluar masuk candi. Beberapa sumber sejarah, termasuk kitab *Manasara*, menjelaskan bahwa bentuk candi menjadi dasar dari pengetahuan arsitektur gapura. Gapura dipahami sebagai bangunan yang ditempatkan di jalur masuk atau keluar suatu area, baik itu tempat suci, wilayah kekuasaan, maupun kawasan tertentu. Dalam konteks tersebut, melewati gapura bukan hanya sekadar perpindahan ruang, tetapi juga simbol bahwa seseorang yang melaluinya telah berada dalam wilayah perlindungan dan otoritas penguasa setempat (Kusuma Wijaya, 2015).

Terlepas dari pengartian tersebut, gapura merupakan sebuah penanda untuk menyatakan suatu wilayah. Berdasarkan aspek historis perkampungan dan gapura merupakan suatu korelasi antara penguasaan tanah dengan batas-batas tertentu, bagaimana cerita tentang seorang kolonis Jawa dari Podorejo (Pringsewu) yang berusaha untuk membuka sebuah kampung baru ditengah hutan dengan meminta izin kepada pihak kolonial, sehingga desa itu terbentuk dengan beberapa batas antara kampung yang lain, hal ini penggunaan tanah dimaksudkan memiliki batasan-batasan yang biasanya diawasi oleh yang berwenang berlandakan para peraturan-peraturan yang mengikat (Sajogyo, 1996).

Gapura adalah suatu bangunan mirip candi yang berdiri tegak nan kokoh dipersimbangan jalan poros desa, ia bisa dilihat ketika akan masuk dan keluar dari satu desa sebagai pertanda bahwa tempat singgah saat itu ada di wilayah mana. Gapura juga menjadi penghubung antara desa satu dengan lainnya, dan mengintegrasikan masyarakatnya dari dalam maupun luar. Sebagai simbol otoritas tradisional, gapura merupakan manifestasi dari ruang dari konsep kuasa Jawa. Masyarakat Jawa kerap kali mengaitkannya

dengan pintu masuk daerah suci, sebab ia menjadi tempat awal pijakan bagi orang-orang untuk menuju pendopo kasultanan maupun kasunanan. Berdasarkan kapasitas spasial yang ditawarkan oleh penguasa wilayah setempat untuk menarik orang-orang kedalam wilayahnya (sebagai praktik pariwisata), sehingga banyak orang Jawa meyakini gapura sebagai reinterpretasi kuasa dan otoritas pemilik rumah.

Kendati singkat, Pemerintah Peralihan Inggris (1811-1815) menyumbang banyak hal terhadap formasi kesadaran teritorial dan kebijakan batas wilayah. Sehingga didalamnya berlaku apa yang disebut sistem pajak yang berdasar pada kepemilikan terhadap sebuah lahan atau tanah yang mana praktik demikian juga sudah menjadi tradisi Jawa jauh sebelumnya. Pada dewasa ini mobilitas penduduk dikalkulasi dan masing-masing dari mereka dicatat. Jan Breman dalam kajiannya tentang Jawa Barat juga menyenggung akan mobilitas seperti ini, adanya pengelompokan rumah-rumah sekaligus pekarangan yang tersebar ke dalam pemukiman-pemukiman yang terpusat (Breman, 1982).



Gambar 1. Foto stereoskopis lanskap desa di Jawa, sekitar tahun 1895-1910-an, *Stereo photographs of village landscapes in Java, around 1895-1910s*
(sumber: www.digitalcollections.universiteitleiden.nl)

Pada gambar 1 memperlihatkan kelompok atau pemukiman penduduk dengan tata ruang desa yang keseluruhannya ditata dengan sedemikian rupa agar sesuai dengan tatanan geometri atau ruang disipliner (*a disciplinary space*) dengan tempat keluar masuk yang jelas demi memudahkan pengawasan. Dapat dikatakan pula gapura sebagai pintu masuk dari jalan utama untuk memberikan semacam hubungan bagi “komunitas desa” tersebut. Selain itu pula gapura terletak pada fungsinya sebagai tanda pembatas, melainkan juga kemampuannya menyematkan suatu kosmologi simbolisasi Jawa yang penuh makna. Dapat dilihat dari bentuk-bentuknya yang beragam dan melambangkan suatu identitas masyarakat tertentu, bagimana gapura yang ada memanfaatkan ikon-ikon daerah serta yang berhubungan dengan kawasan maritim misalnya dengan bentuk ikan dan kapalny, juga berbagai ornamen-ornamen pembentuknya yang meliputi hiasan dan kata yang disematkan.

Keanekaragaman perwujudan gapura di Pulau Jawa hingga saat ini masih bisa disaksikan keberadaanya. Di Lumajang misalnya yang merupakan suatu wilayah kabupaten yang banyak dibangun gapura dengan karakteristik yang unik dan menarik. Pada saat memasuki wilayah kabupaten misalnya akan disuguhkan dengan gapura “Selamat Datang di Kabupaten Lumajang” kemudian beranjak masuk kota akan disuguhkan kembali dengan Patung Kuda Kecak dan Monumen Logo Pemerintah Daerah Lumajang dan beberapa elemen lainnya seperti patung pisang, petani dengan singkong dan lainnya. Sehingga cukup jelas begitu banyaknya gapura sebagai bentuk reinterpretasi suatu identitas.

Maka, tidak lepas pula dengan adanya gapura yang terdapat di skala desa. Desa Jatirejo merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lumajang dengan rincian luas tanah Desa Jatirejo terbagi antara lain, sawah 240.2 Ha, tanah kering 249.5 Ha dan lainnya 57.3 Ha, total luas daerah Desa Jatirejo adalah 540.0 Ha. Berdasarkan data Adminitrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Jatirejo adalah terdiri dari 1247 Kepala Keluarga, dengan jumlah total 3.795 jiwa, dengan rincian 1.815 laki-laki dan 1.980 perempuan. Pun juga mempunyai sejarah dan memorinya tersendiri yang dilekatkan pada beberapa gapura pembatas desa.

Gapura "Gambar Jagung", Pemilik Memori Kehidupan Petani

Jika dikatakan bahwa memori untuk identitas komunitas menyoroti sifat sejarah dan ingatan yang sangat politis, maka hal ini akan berkaitan dengan bagaimana peristiwa-peristiwa dikenang, peringatan apa yang dilakukan, oleh siapa, dan untuk siapa merupakan pertanyaan penting bagi studi tentang suatu komunitas. Sehingga proses-proses yang sedemikian rupa ini lah terjadi bersamaan dalam mengingat dan melupakan juga ada kapan memori sosial yang disahkan secara publik tersebut dijadikan materi, baik dalam bentuk monumen, museum maupun buku pelajaran (Olick & Robbins, 1998).

Sehingga dapat dipastikan gapura merupakan suatu objek pelekatan suatu peristiwa tertentu, baik itu menyoal tentang mengingat atau bahkan sebuah politik pelupaan (Anonim, 2011). Bagaimana sistematisasi komunitas pedesaan yang berangkat dari asumsi dari analisis Onghokham yang menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya seluruh Jawa dibagi menjadi desa-desa yang masing-masing punya batas wilayah dan satu desa dibatasi dengan desa yang lain, sehingga tidak ada kekosongan administratif di Jawa. Sistem perkebunan negara kolonial menghadirkan pemukiman-pemukiman yang tersebar dan sekaligus membangun apa yang dikenal sekarang dengan "komunitas desa" (Kusno, 2007). Sistem perkebunan seperti ini menciptakan pengelompokan batas-batas yang pada akhirnya ditopang dengan adanya gapura sebagai penanda.

Dalam bagian ini, penulis mencoba mengikhtisarkan bagaimana gapura dalam bayangan orang Jawa sebagai sebuah tradisi kultural yang merepresentasikan komunitas lokal Jawa, yang juga memuat nilai sebagai produk politik ruang negara kolonial. Namun, terlepas dari itu penulis akan mencoba memfokuskan pada pembahasan menyoal ingatan masyarakat yang ada pada sebuah gapura, karena bagaimanapun menarik jika penelitian tentang wacana-wacana tentang "wicara simbolik" pada bangunan tertentu akan menghasilkan pemahaman konkret mengenai "komunitas desa" yang sarat sistemisasi dan formasi ruang terpadu. Berikut dokumentasi lama gapura yang ada di Desa Jatirejo.



Gambar 2. Dokumentasi lama gapura pembatas Desa Jatirejo dengan-Desa Jatigono yang ada di wilayah utara sekitar tahun 1970an, *Old documentation of the gate dividing Jatirejo Village with-Jatigono Village in the northern area around 1970s*
 (sumber: Arsip Pemerintah Desa Jatirejo)

Pada gambar 2 cukup jelas menampilkan elemen-elemen apa saja yang ada pada gapura Desa Jatirejo. Dengan rincian gapura berdiri kokoh diantara jalan poros desa, sepintas bentuk gapura seperti candi atau biasa disebut dengan istilah bentuk punden berundak, atap rumah joglo atau sejenisnya. Selain itu, ada instrumen lambang garuda pancasila disisi kiri dan logo Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, serta dibawah lambang terdapat tulisan “*Jer Basuki Mowo Beo*” disisi kiri dan tulisan “*Sepi ing Pamrih, Rame ing Gawe*” disisi lainnya. Selanjutnya ada ornamentasi gambar singkong di kiri dan gambar padi dan jagung disisi kanan, dan tidak lupa penanda batas wilayah bertuliskan “Masuk Desa Jatirejo” diujung paling bawah gapura. Hal yang menarik dari penyebutan gapura pembatas desa tersebut, bahwasannya masyarakat kerap kali menyebutnya dengan gapuran gambar jagung, mungkin dengan alasan kesederhanaan bahasa dalam penyebutan.

Dengan demikian sangat jelas penanda dan memori apa yang dibawa oleh sebuah bagunan tersebut setidaknya ada tiga poin, Pertama, dengan hadirnya lambang pancasila dan logo Pemda maka hal yang ingin disampaikan jelas tentang penanaman jiwa patriotisme nasionalis dan penegasan teritori sebagai eksistensi kewilayahan. Kedua, tulisan-tulisan tersebut tidak lain adalah sebuah slogan sekaligus Ajaran Jawa mengenai nilai-nilai kearifan dalam kehidupan, begitu arti dari *Jer Basuki Mawa Beya* adalah segala sesuatu yang kita cita-citakan harus disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh (Budiyono et al., 2017). Dan secara fungsional slogan tersebut telah lama tercantum pada logo Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya yang tak kalah menarik yakni dari tulisan *Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe*, pepatah Jawa yang satu ini mengajarkan tentang bekerja dengan tulus, secara bahasa asrtinya sepi atau jauh dari pamrih berlebihan, ramai dalam bekerja. Sehingga secara tidak langsung mengajarkan orang Jawa agar bekerja dengan giat tanpa pamrih yang berlebihan. Ketiga, tentang adanya gambar singkong, padi dan jagung yakni menggambarkan komoditas lokal petani di Desa Jatirejo yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani.



Gambar 3. Dokumentasi masyarakat Desa Jatirejo saat bergotong royong merenovasi rumah masyarakat setempat, sekitar tahun 1970-an, *Documentation of the Jatirejo Village community working together to renovate local community houses, around the 1970s*
 (sumber: Arsip Pemerintah Desa Jatirejo)



Gambar 4. Dokumentasi masyarakat Desa Jatirejo saat bergotong royong merenovasi rumah masyarakat setempat, sekitar tahun 1970-an, *Documentation of the Jatirejo Village community working together to renovate local community houses, around the 1970s*
(sumber: Arsip Pemerintah Desa Jatirejo)

Pada gambar 3 dan 4 menjadi bukti, bahwa masyarakat Desa Jatirejo telah lama hidup dengan prinsip goyong royong, sehingga pengaitan atas realitas yang terjadi di lapangan dengan eksistensi gapura pembatas desa maka bukan lagi sebuah mitos belaka. Nyatanya, meskipun sekian lama budaya tersebut tumbuh namun dapat disaksikan pula dimasa mendatang, dan hingga saat ini tradisi gotong royong masih melekat pada diri masyarakat desa dengan dibuktikan adanya gerakan gotong royong bersih desa pada hari Sabtu yang digalakan oleh Pemerintah Desa Setempat.

Prinsip gotong royong tidak hanya berkembang pada sektor sosial kemasyarakatan, bahkan pada sektor pertanian juga pun menganut sistem tersebut. Praktik goyong royong dibidang pertanian terjadi misalnya ketika masa tanam, maka tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa setempat dilakukan dengan tidak adanya upah dalam pekerjaan mereka, sehingga hal ini juga turut menjadi persoalan pelik dikalangan masyarakat desa akan ketimbangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Terlepas dari sistem pertanian dengan sedemikian rupa dengan anggapan adanya “kapitalisme pedesaan” harus dicari sebuah solusi bersama dan nyatanya dewasa ini praktik tersebut sudah tidak ditemukan lagi di Desa Jatirejo.

Menurut penuturan penduduk desa, alasan utama adanya yang mendorong mereka kepada praktik yang sedemikian rupa adalah faktor ekonomi. Ekonomi yang pas-pasan atau bahkan kekurangan dalam hal pangan menuntut masyarakat desa tunduk pada suatu realitas tertentu, tetapi jika merunut pada data kepemilikan tuan tanah di Desa Jatirejo dimana masyarakat dengan mayoritas besar memiliki lahan pertanian baik berupa sawah atau tegalan (ladang). Tetapi tatanan akan penyewaan lahan masih belum ditahap terstruktur, sehingga masyarakat lebih senang menyewakan lahan miliknya kepada pemilik modal, dan memilik untuk bekerja sebagai buruh harian di lahan tersebut meskipun pada akhirnya praktik gotong royong dan tak berupah tersebut harus dilaluinya.

Sekali lagi, implikasinya sangat jelas bahwa ada memori yang terus dibawa dan ada pula politik pelupaan yang berusaha dihilangkan dari klaim masa lalu. Proses pelupaan ini bukan hanya soal ketiadaan teks atau ornamen dalam monumen, tetapi juga bentuk pengendalian atas memori kolektif masyarakat. Anak-anak desa yang tumbuh dengan gapura yang hanya menampilkan slogan modern atau simbol negara akan cenderung mengabaikan kekayaan sejarah lokal desanya sendiri.

Bahkan ketika realitas ini berusaha ditampakan, cerita tentang adanya kapitalisme desa akan ditindih dengan cerita asal usul desa yang sejahtera dari masa kemasa mengalami peningkatan ekonomi warganya dan disusul pula dengan cerita asal usul desa yang layaknya seperti cerita “ketoprak” tersebut. Hal ini tampaknya dapat menjadi dasar klaim status atau ekslusivitas, dan hanya ada sedikit yang menyadari karena bagaimanpun hal itu bukanlah pengetahuan yang penting untuk dilestarikan atau diingat (Araújo & Santos, 2009).

Pada akhirnya monumen pembatas desa tidak selalu netral. Ia adalah bagian dari arena politik memori, tempat di mana yang diingat dan yang dilupakan adalah hasil negosiasi (atau dominasi) kekuasaan. Politik pelupaan pada gapura desa dapat mengikis identitas lokal dan menjauhkan masyarakat dari akar sejarahnya sendiri. Maka, penting untuk mendorong desain gapura dan monumen desa yang inklusif secara sejarah, mewakili keragaman narasi lokal, dan menjadi ruang refleksi bukan sekadar formalitas visual administratif.

Kesimpulan

Gapura sebagai simbol batas suatu wilayah memiliki asal usul yang kompleks di Indonesia. Tulisan ini sedikitnya telah memperhatikan bagaimana posisi gapura bertahan dalam bentuknya dan berfungsi sebagai artefak-artefak memorialisasi, sekaligus sebagai upaya untuk merekonstruksi identitas ruang (spatial identity). Tulisan ini juga telah melacak “asal-muasal” pembentukan desa beserta gapura dalam politik ruang pada masa kolonialisme, serta berulang kali gapura memunculkan tempatnya selagi ia masih tetap kokoh di dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia, sebuah ingatan yang dapat bisa diputar kembali kapanpun.

Tulisan ini telah menyusuri suatu putaran panjang, dari masa kini ke masa lalu dan kembali lagi, seraya menggambarkan interpedensi berbagai macam peristiwa dan peran-peran historis yang diperankan oleh masyarakat Desa Jatirejo. Semua ditransmisikan dari generasi ke generasi lewat pengulangan dari simbol-simbol yang ada di gardu itu sendiri, sehingga dalam merajut peristiwa sejarah dengan jalinan-jalinan memori kolektif seputar gapura akan menunjukkan budaya, formasi dan identitas masyarakat desa tersebut. Akan tetapi, seperti halnya dengan upaya-upaya lain dalam melacak ingatan-ingatan sosial dan formasi identitas, kisah gapura tidaklah bisa lengkap dan tiada batasnya.

Daftar Pustaka

- Angga, P. D., Kardiyanto, D. W., & Herlambang, D. (2023). *Pembuatan desain gapura sebagai unsur pembentuk identitas desa*. 1(November), 100–108.
- Anonim. (2011). Marginalisation, Memory and Monuments. *Economic and Political Weekly*, 46(44).
- Araújo, M. P. N., & Santos, M. S. dos. (2009). History, Memory and Forgetting: Political Implications*. *RCCS Annual Review*, 1. <https://doi.org/10.4000/rccsar.157>
- Ater, R. (2010). Slavery and Its Memory in Public Monuments. *American Art*, 24(1).
- Breman, J. (1982). The Village on Java and the Early-Colonial State. In *The Journal of Peasant Studies* (Vol. 9, Issue 4). <https://doi.org/10.1080/03066158208438179>
- Brigham, R. K. (1999). Monument or Memorial? The Wall and the Politics of Memory. *Historical Reflections*,

25(1).

- Budiyono, K., Yoga, ;, & Feriandi, A. U. P. M. (2017). Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Sebagai Sumber Pendidikan Karakter. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 1(1), 92–103.
- Jatirejo, P. desa. (2019). *Profil Desa Jatirejo*. Pemerintah Desa Jatirejo.
- Kartohadikoesoemo, S. (1984). *Desa*. PN. Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah* (M. Yahya (ed.); Cetakan 1). Tiara Wacana.
- Kurasawa, A. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Penerbit PT. Grasindo.
- Kusno, A. (2007). *Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa*. Penerbit Ombak.
- Kusuma Wijaya, E. S. (2015). *Penciptaan Buku Referensi Situs Gapura Bajang Ratu Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Majapahit*. Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya.
- Olick, J. K., & Robbins, J. (1998). Social memory studies: From “Collective Memory” to the Historical Sociology of Mnemonic Practices. *Annual Review of Sociology*, 24(1998), 105–140. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.105>
- Purnengsih, I., & Kholisya, U. (2019). Representasi Kosmologi Jawa Pada Gapura Kontemporer. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina ...*, 19(1), 113.
- Sajogyo. (1996). *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan*. Gadjah Mada University Press.
- Sari, S. R., Iswanto, D., Darmawan, E., Lorenza, W. M., & Hilmy, M. F. (2019). Konsep Desain Gapura Desa Asembooyong. *Pasopati*, 1(2), 91–98.
- Sosialismanto, D. (2001). *Hegemoni Negara Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*. Lapera Pustaka Utama.
- Tahir, M. I. (2018). Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa Depannya. *ISSN 1410-1777*.
- Yanda Bara Kusuma, Lugas Nugraha Nadra, Duta Rahma Safira, & Marissa Ariny. (2024). Pelestarian Gapura Wringin Lawang Sebagai Potensi Sarana Edukasi di Trowulan. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(3), 132–143. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i3.3073>